



Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Asmika Rahman

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

Abstrak

Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik pada para generasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Konsep Dasar; Pendidikan Politik; Pemilih Pemula.

Abstract

Politics is the means the most elegant in the grab or get a power. Policies that exist within a country is a political product that is used by a group of people, in this case is the Government, to influence or change an order of people's lives. Of course it is not easy to influence or give a political understanding on the community. There are several factors that can affect the dominant understanding of the political community, namely educational factors, environmental factors, factors of gender, heredity factors to livelihood. Citizenship education has an important role in influencing or providing an understanding of politics through means of education in the school environment in particular like a novice voters and the public in General. The purpose of this writing is to make the students as well as community voters beginners can have fundamentally understanding about politics through means of civic education as a political education. So the student as novice voters and the public in general political literacy and are able to demonstrate participatory attitude towards politics. Writing method used in this study is a journal paper libraries supported by the results of relevant research. Citizenship education as one of the media means of political education is expected to increase political participation on the young generasi or commonly referred to as novice voters, resulting in the application of the concept of community Democratic concluded properly.

Keywords: The Basic Concept; Political Education; Novice Voters.

How to Cite: Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 44-51.

*Corresponding author:
E-mail: asmikarahman89@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Di era serba canggih saat ini, kita dituntut untuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, menaikkan harga bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaraan bermotor, merubah kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk melek politik atau dengan kata lain faham terhadap politik, agar tidak mudah terprovokasi atau ditipu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu Negara, karena sukses atau tidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatas mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif, presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut selalu terdapat pemilih pemula. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (Setiajid, 2011:19). Berarti kriteria pemilih pemula merupakan mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah atau yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Salah satu peran masyarakat atau pemilih pemula dalam politik adalah memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan, dari fungsi inilah sehingga dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah harus mempertimbangkan segala sesuatunya berdasar atas keinginan dan kebutuhan rakyatnya, bukan karena atas dasar keinginan suatu kelompok saja.

Tentu bukanlah hal mudah dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat (rakyat). Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tersebut dapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik. Dari segi budaya politik juga memiliki peran besar dalam pemahaman masyarakat terhadap politik, yaitu seperti dikemukakan oleh Gabriel Al Almond dan Sidney Verba (1990:21) yang mengatakan bahwa budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu. Sedangkan menurut Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew (1986:41) mengatakan budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Materi-materi yang berkaitan dengan politik secara eksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI (sebelas), yaitu pada BAB Budaya Politik. Bab ini menjelaskan tentang pengertian budaya, politik, budaya politik, tipe-tipe budaya politik dan lain sebagainya. Sehingga harapannya, setelah peserta didik selesai menempuh materi ini, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik, serta mampu menampilkan peran serta budaya politik partisipan. Begitu juga pendidikan politik yang dapat kita berikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikut kegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihan umum (Kepala Desa/Dukuh) dan lain sebagainya.

Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih

pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Adapun manfaat teoritik dari penulisan ini adalah bagi penulis dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam penyusunan sistematika pembuatan paper. Penulis juga mendapatkan pengetahuan tentang konsep dasar pendidikan politik dalam masyarakat. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangannya dalam penulisan paper ini. Adapun manfaat bagi siswa dan masyarakat luas adalah membentuk siswa dan masyarakat yang tahu dan faham akan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana siswa dan masyarakat dibekali dengan pengetahuan budaya politik dan diajarkan tentang bagaimana partisipasi seharusnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Politik

Politik memiliki makna cukup beragam. Ada yang menyebutnya dengan seni dan ilmu pemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagian kekuasaan. Pada dasarnya politik berkenaan dengan perilaku manusia dalam mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan.

Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secara etimologis, politik berasal dari Bahasa Yunani "*polis*" yang artinya negara kota. Dari istilah *polis* ini, berkembang konsep *polites* yang berarti warga negara dan konsep *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Dari arti etimologis tersebut, politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan atau antara warga negara pada suatu negara kota. Dalam bahasa Inggris, akar katanya adalah *politics*, yang bermakna kebijaksanaan (*policy*). Jika dilihat dari kedua bahasa tersebut, bahasa Yunani dan Inggris, maka politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara kota (Sitepu, 2012).

Pengertian politik dari para ahli diantaranya dikemukakan oleh Laswell dkk (1952) bahwa

politik merupakan suatu proses dalam bentuk "siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana" (*politics as who gets, what, when, and how*). Easton (1981) merumuskan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, dan konflik.

Affandi (1971) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara. Menurut Budiarto (2008) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem (sosial) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan.

Budaya Politik

Menurut G.A. Almond dan S. Verba (1991), budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Menurut Marbun (2005), budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakannya dalam masyarakat.

Menurut Larry Diamond (2003), budaya politik adalah keyakinan, sikap, ide-ide, nilai, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Menurut Mas'ood dan Andrews (1986), budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Menurut Almond dan Powell (1966), budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan-kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat.

1. Tipe-tipe Budaya Politik

a. Budaya Politik Parokial (*Parochial Political Culture*)

Budaya Politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Pada umumnya budaya politik ini terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana. Dalam masyarakat

seperti ini, spesialisasi sangat kecil dan belum banyak berkembang.

b. Budaya Politik Subyek (*Subject Political Culture*)

Menurut Muchar Mas'od dan Colin MacAndrews, budaya politik subjek menunjukkan pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang (UU), tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

c. Budaya Politik Partisipan (*Participant Political Culture*)

Menurut Almond dan Verba, budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eskplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik ini ditandai oleh adanya kesadaran bahwa dirinya ataupun orang lain, sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Ini menunjukkan pada orang-orang yang tidak dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (*Voting*) dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan.

2. Pendidikan Politik

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'od (1986), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramdlang Naning (1982:8), pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan

dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Alfian (1990) mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.

Menurut Kantaprawira (2004), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum; b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); c) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

3. Bentuk dan Proses Pendidikan Politik

Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Kavang (1998), itu terbagi atas dua jenis, yaitu: (a) Bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus. (b) Bentuk dan proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).

Adapun bentuk sosialisasi politik berdasarkan jumlah peserta (*audience*) atau massa

yang mengikutinya dibedakan menjadi bentuk umum dan bentuk terbatas. Bentuk umum terjadi bila massa (*audience*) yang melaksanakannya tidak dibatasi jumlahnya sedangkan bentuk yang terbatas jumlahnya dibatasi untuk kalangan tertentu.

4. Partisipasi Politik

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari kata latin "*Pars*" dan "*capere*". *Pars* berarti bagian-bagian dan *capere* berarti mengambil atau ikut serta. Jadi diartikan partisipasi adalah "ikut serta mengambil bagian". Kemudian dalam bahasa Inggris, disebut *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Rush dan Althoff (2001) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Menurut Budiardjo (2008), sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.

5. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut (Mas'ood & Andrews 1986) partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Hal tersebut adalah:

- a. Partisipasi politik secara konvensional adalah pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.
- b. Partisipasi politik secara non konvensional adalah pengajuan petisi demonstrasi, konfrontasi mogok, tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik

terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi).

6. Pemilih Pemula

Pemilih adalah sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideology tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik (Prihatmoko, 2005).

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun (Fenyapwain, 2013).

Pahmi (2010) mengatakan bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Sedangkan menurut Suhartono (2009:6) pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu, semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari.

7. Teori Perilaku Pemilih (*Voting Behavior*)

Perilaku pemilih (*voting behavior*) dapat dianalisis dengan tiga pendekatan, antara lain adalah :

- a. Pendekatan Sosiologis. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku pemilih terhadap keanggotaan kelompok mengatakan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya dimana ia berada, terutama dalam kelompoknya. Pengaruh sosiologis terhadap perilaku pemilih yakni identifikasi kelas sosial yakni kesamaan yang dalam pandangan pemilih ada diantara kedudukan sosial dirinya dengan kedudukan sosial partai politik. Namun juga aspek agama, kelas sosial, etnisitas, gender, dan juga aspek daerah tempat tinggal (Sitepu, 2012).
- b. Pendekatan Psikologis. Pemilih yang secara psikologis terikat dengan partai politik, atau berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya. Lalu kemudian ada lagi yang namanya identifikasi kelas sosial yaitu kesamaan yang dalam pandangan pemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinya dan kedudukan sosial partai politik. Para pemilih dilihat sebagai orang yang mengidentifikasi dirinya dengan satu partai politik tertentu. Jadi, intinya adalah bahwa identifikasi seseorang pemilih dengan partaipartai politik tidak didasarkan kepada kesamaan kelas sosial akan tetapi didasarkan pada kesamaan orientasi budaya (Sitepu, 2012).
- c. Pendekatan Rasional. Alasan pilihan rasional berupa perhitungan tentang untung dan rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik (suatu hal yang dapat menjelaskan mudahnya perpindahan seseorang dari partai satu kepartai yang lainnya). Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Oleh sebab itu yang menjadi pertimbangan adalah tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan. Bagi pemilih, pertimbangan untung rugi dipergunakan untuk membangun keputusan

tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih (Sitepu, 2012).

Studi mengenai perilaku memilih juga dikembangkan oleh Dennis Kavanagh (Imawan 1995) sebagai berikut:

- a. *Structural Approach*. Dalam pendekatan ini struktur social dipandang sebagai basis dari pengelompokan politik. Bahwa tingkah laku politik seseorang, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya, ditentukan oleh pengelompokan sosialnya yang pada umumnya didasarkan atas kelas sosial, agama, desakota, bahasa dan nasionalisme.
- b. *Sociological Approach*. Pendekatan ini berpendapat bahwa tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh identifikasi serta norma-norma yang dianut oleh satu kelompok. Dalam pendekatan ini, mobilitas seseorang untuk keluar dari satu kelompok dan bergabung dengan kelompok lain masih dimungkinkan.
- c. *Ecological Approach*. Pendekatan ini memandang faktor-faktor yang bersifat ekologis, seperti daerah, sangat menentukan tingkah laku politik seseorang. Misalnya, dalam pendekatan ini percaya bahwa mereka yang lahir dan dibesarkan di daerah pesisir pantai lebih bersikap demokratis dibandingkan dengan mereka yang berada di pegunungan.
- d. *Social Psychological Approach*. Dalam pendekatan ini tingkah laku dan keputusan politik seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara factor internal, seperti sistem kepercayaan, dan factor eksternal, seperti pengalaman politik. Pendekatan ini memandang bahwa tingkah laku dan kepercayaan individu menentukan dan membentuk norma-norma kelompok.
- e. *Rational Choice Approach*. Pendekatan ini memandang bahwa semakin modernnya serta makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka masyarakat akan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh bila melakukan satu tindakan politik.

SIMPULAN

Siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum dituntut untuk melek terhadap politik, agar dapat berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, maka diperlukan pendidikan politik sejak dini. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah bagi pemilih pemula. Politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara kota. Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Pendidikan politik dalam hal ini dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, secara eksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI (sebelas), yaitu pada BAB Budaya Politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan umum dengan usia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin serta baru pertama kali mendapatkan hak suara pada saat pemilu dilaksanakan. Perilaku pemilih (voting behavior) dapat dianalisis dengan tiga pendekatan, antara lain (a) Pendekatan Sosiologis, (b) Pendekatan Psikologis, (c) Pendekatan Rasional. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan rasional, yaitu pertimbangan untung rugi dalam memilih partai atau kandidat calon pemimpin, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih yang dilakukan oleh siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Dr. Marzuki, M.Ag. dan DR. Suharno, M.Si. selaku dosen pengampu

matakuliah Penulisan Karya Ilmiah. Telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan paper jurnal ini. Terimakasih juga kepada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana, sudah memberikan kesempatan dalam berkarya dan pengembangan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. (1971). *Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan*. Alumni Bandung.
- Alfian. (1990). *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Almond, G. & G. Bingham Powell, Jr. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little Brown and Company Inc.
- Almond, G. & Sidney .V. (1990). *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy: Towards Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Easton, D. (1981). *A Framework for Political Analysis*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Fenyapwain, M.M. (2013). Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounolet Kecamatan Kakas. *Journal "Acta Diurna"* Volume I. No. 1 Tahun 2013.
- Imawan, R. (1995). Pemilihan Umum 1992. *Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992. Suatu Evaluasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Kantaprawira, R. (2004), *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Kavang, D. (1998). *Political Culture*. Bandung: Armico.
- Khalehar, M.F.A., Ade A.J.S, Ivan S.Z., Prayetno, (2017), Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Proses Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun 2016, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1): 99-101.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Jurnal Politico* 1 (7): 1-15.
- Laswell, H. D., Lerner, D., & Rothwell, C. E. (1952). *The Comparative Study of Elites*. Stanford: Hoover Institute Studies.
- Marbun, B.N. (2005). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'oeed, M., & Andrews, C. (1986). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Naning, Ramdlang, (1982), *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Jakarta: Liberty.
- Pahmi, S.Y. (2010). *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gunung Press.
- Pasaribu, P., (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5 (1): 51-59
- Prihatmoko, J.J. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Langsung. *Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Rush, M & Althoff, P. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiajid. (2011). Orientasi politik yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010. *Integralistik No.1/Th.XXII/211*, Januari-Juni 2011, hal. 18-33.
- Sitepu, P. A. (2012). *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhartono. (2009). Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada; Suatu Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)", (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009) hal 6.
- Suharyanto, A. (2017). Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2008.Tentang Pemilih Pemula.